



RENJA **INSPEKTORAT**

2025

RENCANA KERJA

KOTA CIMAHI

JALAN PESANTREN KM2 NO. 107

Tlp . (022)6630330

Fax. (022)6654508

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Inspektorat Kota Cimahi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 ini disusun mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dan selanjutnya bersama dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Tahun 2024.

Dengan disusunnya Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 ini diharapkan Inspektorat Kota Cimahi dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan, efektif, efisien dan akuntabel.

Akhir kata semoga Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 ini bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kota Cimahi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ditetapkan di : Cimahi

Pada Tanggal : April 2024

INSPEKTUR KOTA CIMAHI, 9



Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650921 199102 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023	 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026	8
2.2. Analisis Kinerja Inspektorat	27
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT	 56
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	56
3.3. Program dan Kegiatan	57
3.3.1 Rencana Program	58
3.3.2 Rencana Kegiatan	58
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	 76
4.1. Rencana Program dan Kegiatan	80
4.1.1. Rencana Program	80
4.1.2. Rencana Kegiatan	80
4.2. Rencana Pagu Indikatif	81
 BAB V PENUTUP	 84
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023	8
Tabel 2.2.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d. Tahun 2023 Kota Cimahi	15
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi	30
Tabel 2.4.	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Cimahi	33
Tabel 2.5.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Cimahi	52
Tabel 3.1.	Keterkaitan Tujuan Inspektorat Kota Cimahi Renstra 2023-2026 dengan Kebijakan Prioritas Nasional, Kebijakan Prioritas Provinsi Jawa Barat, dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Kota Cimahi yang Berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat	56
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025	57
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Cimahi	60
Tabel 4.2.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Indikatif Tahun 2024	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Inspektorat tahun 2025 berpedoman kepada Renstra Inspektorat tahun 2023-2026. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renja 2025 adalah tahun perencanaan ke-3 dari Renstra Inspektorat tahun 2023-2026.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Cimahi tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 terdiri dari: Persiapan penyusunan Renja, Penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja, dan Penetapan Renja.

Persiapan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2025 meliputi: Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Inspektorat Tahun 2025, orientasi mengenai Renja Inspektorat Tahun 2025, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Inspektorat Tahun 2025, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Inspektorat Tahun 2025 meliputi: Penyusunan rancangan awal Renja Inspektorat yang berpedoman pada Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026, hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun 2023, dan hasil evaluasi Renja Inspektorat tahun 2024 triwulan 1. Penyusunan Rancangan Awal Renja Inspektorat Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Inspektorat bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Inspektorat. Renja Inspektorat Tahun 2025 berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2023) dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (Tahun 2024) bertujuan untuk memastikan rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Inspektorat Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026. Rancangan awal Renja Inspektorat Tahun 2025 disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah. Penyempurnaan rancangan awal Renja Inspektorat Tahun 2025 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD Kota Cimahi Tahun 2025, rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru. Rancangan Awal Renja Inspektorat Tahun 2025 diajukan Inspektur kepada kepala Bappelitbangda dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Renja Inspektorat Tahun 2025 merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Inspektorat Tahun 2025 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2025 dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2025 disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda Kota Cimahi untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 menjadi rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun 2025.

Bappelitbangda Kota Cimahi melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Inspektorat Tahun 2025. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Inspektur Kota Cimahi kepada kepala Bappelitbangda.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah merupakan pembahasan dengan pemangku kepentingan. Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Perumusan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Tahun 2025 dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Inspektorat berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD Kota Cimahi Tahun 2025.

Penetapan Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 menjadi pedoman Inspektorat dalam menyusun RKA Inspektorat Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai tujuan Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 : "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah" serta mencapai sasaran: "Meningkatnya kualitas pengawasan" dan "Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik".

1.2. Landasan Hukum

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;

19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
20. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;
21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025. Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 745, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 225.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Cimahi tahun 2025 dimaksudkan sebagai:

- a. Dokumen dan pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan daerah selama tahun 2025;
- b. Pedoman penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2025 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Cimahi tahun 2025 adalah :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Terwujudnya aparatur yang profesional, handal dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
- c. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Cimahi selama tahun 2025;
- d. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- e. Menciptakan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.
- f. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA Inspektorat tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Cimahi tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja Tahun 2025 Inspektorat Kota Cimahi

BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, analisa kinerja pelayanan Inspektorat, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, reviu terhadap RKPD Kota Cimahi, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional pada bidang pengawasan, tujuan dan sasaran Renja Inspektorat, Program dan Kegiatan Inspektorat.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Memuat Program, Kegiatan dan Pendanaan untuk Tahun Anggaran 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat penjelasan ringkasan Renja serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Inspektorat dalam mengimplementasikan Renja.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2023 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.1. sebagai berikut.

Tabel.2.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
1	Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	5%	5,7%	114,00%
2	Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3,02	100,67%
3	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63	80,54	127,84%

Berdasarkan Tabel 2.1. di atas, Tahun 2023 Inspektorat Kota Cimahi memiliki 3 Indikator Kinerja Utama, yaitu: Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (target 5%, realisasi 5,7%, capaian kinerja 114,00%); Nilai Maturitas SPIP (target Level 3, realisasi Level 3,02, capaian kinerja 100,67%); dan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (target 63, realisasi 80,54, capaian kinerja 127,84%)

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pencapaian sasaran kinerja Inspektorat. Faktor-faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :
 - a. Mekanisme kerja Inspektorat Daerah Kota Cimahi yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
 - b. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Inspektorat Daerah Kota Cimahi,

dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.

- c. Adanya kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- d. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.
- e. Terdapat anggaran kegiatan tidak dapat diserap karena efesiensi anggaran.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah Perangkat Daerah yang diawasi.
- b. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah belum optimal.

Tahun 2023 Inspektorat Kota Cimahi melaksanakan 3 Program (5 Target indikator program), 11 Kegiatan (11 Target indikator kegiatan) dan 31 Sub Kegiatan (31 Target indikator Sub Kegiatan).

Dari 3 Program dengan 5 target indikator program yang dilaksanakan, terdapat 2 (dua) Target indikator program yang capaiannya 100%, 2 (dua) Target indikator program yang capaiannya di atas 100%, dan ada 1 (satu) target indikator program yang capaiannya di bawah 100%.

Dari 11 Kegiatan dengan 11 target indikator kegiatan, seluruhnya kinerjanya memenuhi target, yaitu 100%. Dari 32 Sub Kegiatan dengan 32 target indikator Sub Kegiatan, seluruhnya kinerjanya memenuhi target, yaitu 100%.

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Terdapat 1 (satu) target indikator program yang capaiannya di bawah 100%, yaitu capaian kinerja Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah. Target Nilai IKM Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah 95% (Kategori "Sangat Baik"), realisasi 80,27% (kategori "Baik"), sehingga capain kinerjanya 84,49%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja Nilai IKM, yaitu:

1. Kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
2. Kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
3. Kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
4. Kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
5. Kurang optimalnya perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat.
6. Kurang optimalnya pengawasan pelaksanaan pelayanan masyarakat.
7. Kurang optimalnya koordinasi dalam melaksanakan pelayanan masyarakat.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab terpenuhinya capaian target kinerja program/kegiatan

Terdapat 2 (dua) indikator program yang capaian kinerjanya 100% atau memenuhi target, yaitu Indikator Level Peningkatan Kapabilitas APIP dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Target Level Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2023 Level 3, Realisasinya Level 3,00, sehingga capaian kinerjanya 100%. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terpenuhinya capaian target kinerja Level Peningkatan Kapabilitas APIP:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman, yaitu Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah No. 8 Tahun 2020.
2. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan optimal. APIP Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan pendampingan, asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi kepada 30 Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan Kebijakan RB Terbaru dan Kemenpan RB, tentang RB Tematik dan RB General.
3. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dengan baik. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi kepada ASN, Sosialisasi Anti Korupsi kepada Anggota DPRD, Sosialisasi Anti Korupsi kepada Siswa SMP.
4. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dilaksanakan setiap triwulan dengan target dapat menindaklanjuti hasil pengawasan : Inspektorat Kota Cimahi, Inspektorat Provinsi, dan BPK RI (Berikut adalah hasil TLHP Kota Cimahi Tahun 2023: TLHP Inspektorat Kota 97,29%, TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Barat 94,10%, TLPH BPK RI 81,35%).
5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP Inspektorat dalam peningkatan kompetensi APIP berjalan dengan baik. Sebagian besar Pegawai Inspektorat memenuhi terget 120 jam mengikuti Bimtek/Pendidikan/Pelatihan peningkatan kompetensi dalam satu tahun.

Target Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah A, realisasinya A, sehingga capaian kinerjanya 100%. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terpenuhinya capaian target kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah:

1. Efektif dan efisiennya pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan telah disusun dokumen Renja Murni 2023, Renja Perubahan 2023, Renja 2024, Rencana Aksi Kinerja 2023, Rencana Aksi Kinerja perubahan 2023, Perjanjian Kinerja, Monitoring dan evaluasi Renja setiap Triwulan, Monev Rencana Aksi Kinerja 2023 setiap Triwulan, Monev Kinerja Individu.
2. Efektif dan efisiennya koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja antara Inspektorat, Bagian Organisasi, dan Bappelitbangda.

c. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab melebihi capaian target kinerja program/kegiatan

Terdapat 2 (dua) Target indikator program yang capaiannya di atas 100%, yaitu Target Persentase Hasil Pengawasan dan Target Indeks Profesionalitas ASN.

Target Persentase Hasil Pengawasan Tahun 2023 sebesar 82%, realisasi 97,29%. Sehingga capaian kinerjanya 118,65%. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan capaian kinerja Persentase Hasil Pengawasan di atas 100%:

1. Efektif dan efisiennya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal, meliputi: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; Reviu Laporan Kinerja; Reviu Laporan Keuangan; Monitoring, dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
2. Efektif dan efisiennya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, meliputi:

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah; Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap program Renstra 2023-2026 adalah perlunya upaya yang lebih optimal agar target akhir periode Renstra yaitu, nilai IKM Inspektorat mencapai 96,5 pada tahun 2026. Diperlukan penambahan kegiatan dan anggaran dalam upaya percepatan capaian kepuasan masyarakat, melalui optimalisasi kegiatan perencanaan, pengawasan dan koordinasi pelayanan Inspektorat terhadap masyarakat.

e. Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak tercapainya Kinerja Program/Kegiatan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang akan dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja Nilai IKM, yaitu:

1. Optimalisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
2. Optimalisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
3. Optimalisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
4. Optimalisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
5. Optimalisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
6. Optimalisasi pengawasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

7. Optimalisasi koordinasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Cimahi s.d. Tahun 2023, terdapat dalam **Tabel 2.2**.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Cimahi 2023-2026 dapat dikatakan berhasil.

Tabel 2.2.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s.d. Tahun 2023
Kota Cimahi**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase Peningkatan Ketepatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	20%	N.A	5%	5,7%	114,00%	5%	50,00 %
6.01.0 2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Hasil Pengawasan	90%	78,57%	82%	97,29%	118,65%	97,29%	50,00 %
6.01.0 2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	100 Kegiatan	29 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100,00%	25 Kegiatan	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-110/40
6.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	120 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100,00%	30 Laporan	30 Laporan	50,00 %
6.01.02.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Laporan	30 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	5 Laporan	5 Laporan	50,00 %
6.01.02.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100,00%	30 Laporan	30 Laporan	50,00 %
6.01.02.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	120 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100,00%	30 Laporan	30 Laporan	50,00 %
6.01.02.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APMP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APMP	48 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11- (10/4)
6.01.0 2.2.02 .	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	32 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%	8 Kegiatan	8 Kegiatan	50,00 %
6.01.0 2.2.02 .01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah yang Ditangani	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	4 Laporan	4 Laporan	
6.01.0 2.2.02 .02.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	-	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	5 Laporan	5 Laporan	
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	Level 2,672	Level 3	Level 3,020	100,67%	Level 3	Level 3	50,00 %
6.01.0 3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2,14	Level 3	Level 3	100,00%	Level 3	Level 3	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 110/4
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitas yang dihasilkan	8 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	50,00 %
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	8 Rekomendasi	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100,00%	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	72 Kegiatan	16 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	100,00%	18 Kegiatan	18 Kegiatan	50,00 %
6.01.03.2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100,00%	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.03.01.0	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	144 Kegiatan	22 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100,00%	36 Kegiatan	36 Kegiatan
6.01.03.02.0	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dan pendampingan Pencegahan Integritas	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100,00%	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah
6.01.03.03.0	INSPEKTORAT DAERAH	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	66	89,60	63	80,54	127,84%	64	50,00 %
6.01.03.04.0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A (83)	A (83)	A (83,20)	100,24%	A(83,20)	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi (Target Renstra (%))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-12 (10/4)
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	52 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	100,00%	13 dokumen	13 dokumen	50,00 %
6.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	28 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100,00%	7 dokumen	7 dokumen	50,00 %
6.01.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72 Laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	100,00%	18 laporan	18 laporan	50,00 %
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah	96,5	-	95	80,27	84,49%	80,27	80,27	50,00 %
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Keuangan yang tepat waktu	80 Laporan	6 laporan	20 Laporan	20 Laporan	100,00%	20 Laporan	20 Laporan	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	36 orang	35 orang	35 orang	100,00%	35 orang	35 orang	50,00 %
6.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100,00%	2 laporan	2 laporan	50,00 %
6.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	6 laporan	18 laporan	18 laporan	100,00%	18 laporan	18 laporan	50,00 %
6.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11- (10/4)
6.01.0 1.2.06 .02.	Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	5 paket	5 paket	100,00%	1 paket	1 paket	50,00 %
6.01.0 1.2.06 .04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	48 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100,00%	12 paket	12 paket	50,00 %
6.01.0 1.2.06 .05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100,00%	12 paket	12 paket	50,00 %
6.01.0 1.2.06 .09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 laporan	50,00 %
6.01.0 1.2.06 .10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Rencana Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024	
					Target Renstra Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renstra Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi i Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-
6.01.0 1..2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah set/unit BMD yang disediakan	8 set/unit	2 set/unit	1 set/unit	1 set/unit	100,00%	2 set/unit	2 set/unit	50,00 %
6.01.0 1..2.0 7.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 paket	4 paket	-	-	-	1 paket	1 paket	50,00 %
6.01.0 1..2.0 7.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	50,00 %
6.01.0 1..2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	50,00 %
6.01.0 1..2.0 8.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12 Laporan	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.01.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	12	50,00 %
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan BMD	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	50,00 %
6.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00%	3 unit	3 unit	50,00 %
6.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100,00%	2 unit	2 unit	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	4 unit	11 unit	11 unit	100,00%	11 unit	11 unit	50,00 %
6.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	50,00 %
6.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	51,50	-	50,00	75,59	151,18%	75,59	75,59	50,00 %
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawalan	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	100,00%	35 orang	35 orang	50,00 %
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45 paket	-	45 paket	45 paket	100,00%	45 paket	45 paket	50,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektorat) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektorat Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Inspektorat s.d. tahun 2024	
					Target Renja Inspektorat Tahun 2023	Realisasi Renja Inspektorat Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10/4
6.01.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	-	35 Orang	35 Orang	100,00%	35 Orang	35 Orang	50,00 %
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	35 Orang	35 Orang	35 Orang	100,00%	35 Orang	35 Orang	50,00 %

2.2. Analisis Kinerja Inspektorat

Inspektorat tidak mengampu indikator SPM/Standar Nasional. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Tahun 2023-2026 adalah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Target Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2023 adalah Level 3, realisasi Level 3,020. Sehingga capaian kinerjanya 100,67%. Target Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2023 adalah Level 3, realisasi Level 3,020, sehingga capaian kinerjanya 100,00%.

Realisasi Nilai Maturitas SPIP Tahun 2023 mengalami kenaikan dari Tahun 2022. Kenaikannya sebesar 0,348 poin. Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2022 sebesar 2, 672. Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar 3,020. Kenaikan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Peningkatan intensitas koordinasi tim Penilai Mandiri SPIP Inspektorat Kota Cimahi dengan Tim Penilai Maturitas SPIP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan dokumen penilaian Mandiri Maturitas SPIP. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dan efektif ini dalam pemenuhan dokumen penilaian membuahkan hasil peningkatan nilai dari komponen penilaian Maturitas SPIP. Komponen Penilaian Maturitas SPIP terdiri dari 3, yaitu: Penetapan Tujuan; Struktur dan Proses; dan Pencapaian tujuan. Nilai komponen Penetapan tujuan tahun 2022 tidak mengalami kenaikan di Tahun 2023, yaitu tetap nilainya 1,2. Nilai Komponen Struktur dan Proses mengalami peningkatan dari 0,647 di tahun 2022, menjadi 0,8906 di tahun 2023. Nilai Komponen Pencapaian tujuan mengalami peningkatan dari 0,825 tahun 2022 menjadi 0,9300 di tahun 2023.
- b. Optimalnya Pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, kegiatan pendampingan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi, Kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kegiatan

Pendampingan dan Asistensi dan verifikasi penegakan integritas dilaksanakan sesuai PKPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Nilai Peningkatan Kapabilitas (PK) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2023 mengalami kenaikan dari Tahun 2022. Kenaikannya sebesar 0,860 poin. Nilai Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Cimahi Tahun 2022 sebesar 2,140. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar 3,00. Kenaikan ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- a. Peningkatan intensitas koordinasi tim Penilai PK APIP Inspektorat Kota Cimahi dengan Tim Penilai PK APIP BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan dokumen penilaian PK APIP. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dan efektif ini dalam pemenuhan dokumen penilaian membuahkan hasil peningkatan nilai dari komponen penilaian PK APIP mencapai Level 3 di Tahun 2023. Terdapat 6 (enam) elemen penilaian Kapabilitas APIP, yaitu: 1)Pengelolaan Sumber Daya Manusia; 2)Praktik Profesional; 3)Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 4)Budaya dan Hubungan Organisasi; 5)Struktur Tata Kelola; 6)Peran dan Layanan. Capaian elemen Pengelola SDM Tahun 2022 dengan Tahun 2023 tetap yaitu sebesar 0,540. Capaian elemen Praktik Profesional mengalami kenaikan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, yaitu dari 0,270 menjadi 0,45. Capaian elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mengalami kenaikan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, yaitu dari 0,150 menjadi 0,180. Capaian elemen Budaya dan Hubungan Organisasi dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 tetap, yaitu 0,180. Capaian elemen Struktur Tata Kelola mengalami kenaikan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, dari 0,200 menjadi 0,36. Capaian elemen Peran dan Layanan mengalami kenaikan dari Tahun 2022 ke Tahun 2023, dari 0,800 menjadi 1,200.

- b. Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan.
- c. Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, meliputi: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi; Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Pendampingan; Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Pencapaian Kinerja Inspektorat berdasarkan IKK, terdapat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
Kota Cimahi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		√	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3,02	-	Level 3	Level 3	Nilai Maturita SPIP Tahun 2023 telah memenuhi target		
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		√	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3	Level 3	Nilai Kapabilita s APIP Tahun 2023 telah memenuhi target		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat Kota Cimahi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki tugas sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kota (*Welfare State*).

Berikut adalah Isu-Isu Penting Inspektorat Kota Cimahi:

- a. Jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan jumlah Perangkat Daerah yang diawasi belum memadai.
- b. Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme belum memadai.
- c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan Perangkat Daerah belum optimal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdampak terhadap pencapaian Misi ke-2 Kota Cimahi Tahun 2023-2026, yaitu "Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik".

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 adalah:

- Perkembangan teknologi memberikan peluang terhadap *digital fraud*.
- Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan selalu berganti dan mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK dan tuntutan untuk memahami PBJ dan perizinan yang dinamis, merupakan tantangan yang harus dihadapi. Sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD salah satunya melalui kemampuan *Probit Audit*.
- Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas Pemerintahan (PPUPD). Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tanggal 26 Oktober

Tahun 2021, Nomor: S-1057/K/JF/2021, Hal Rekomendasi Kebutuhan JFA (Jabatan Fungsional Auditor) pada Inspektorat Kota Cimahi kebutuhan Auditor Inspektorat Kota Cimahi sebanyak 61 orang. Sedangkan yang tersedia baru 18 orang. Berdasarkan Surat Sekretaris Inspektur Jendral kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 800.1.2.1/3113/IJ, Tanggal 9 November 2022, Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Kota Cimahi Kebutuhan PPUPD Inspektorat Kota Cimahi 38 orang. Sedangkan yang tersedia baru 6 orang.

Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 yaitu:

- Alokasi anggaran Inspektorat Tahun 2025 sebesar 0,75 % dari APBD Kota Cimahi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam negeri Republik Indonesia, Tanggal 9 Desember 2022, Nomor: 700.1.1/8737/SJ, Hal: Penguatan Inspektorat Daerah Dalam pengawasan Pemerintah Daerah. Alokasi anggaran ini diantaranya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta menghadapi tantangan dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat pada rancangan awal RKPD mengalami perubahan setelah hasil analisis kebutuhan. Perubahan terjadi pada kebutuhan dana. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Cimahi terdapat dalam **Tabel 2.4** berikut.

Tabel 2.4.
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Cimahi	Indeks Reformasi Birokrasi	60,78	10.989.564.000	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Kota Cimahi	Indeks Reformasi Birokrasi	60,78	17.341.006.238	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Kota Cimahi	Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	5%	1.246.653.572	INSPEKTORAT DAERAH	Kota Cimahi	Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	5%	2.113.205.128	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Cimahi	Persentase Hasil Pengawasan	88%	742.750.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kota Cimahi	Persentase Hasil Pengawasan	97,29%	2.113.205.128	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	25 kegiatan	592.740.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	25 kegiatan	1.657.223.064	
6.01.02.2.01.00.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	30 laporan	209.970.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	30 laporan	653.392.064	
6.01.02.2.01.00.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	5 laporan	82.285.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	5 laporan	263.940.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (12)
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.02.2.01.00.03	Revisi Laporan Kinerja	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil revisi laporan kinerja	30 laporan	45.485.000	Revisi Laporan Kinerja	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil revisi laporan kinerja	30 laporan	274.160.000	
6.01.02.2.01.00.04	Revisi Laporan Keuangan	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil revisi laporan keuangan	30 laporan	75.000.000	Revisi Laporan Keuangan	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil revisi laporan keuangan	30 laporan	178.745.000	
6.01.02.2.01.00.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APSP	12 dokumen	180.000.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Kota Cimahi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APSP	12 dokumen	286.986.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.02.2.02.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	8 kegiatan	150.010.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	8 kegiatan	455.982.064	
6.01.02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	4 laporan	60.765.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah yang ditangani	4 laporan	166.272.064	
6.01.02.2.02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	5 laporan	89.245.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	5 laporan	289.710.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Kota Cimahi	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	503.903.572	INSPEKTORAT DAERAH	Kota Cimahi	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Level 3	2.295.491.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Cimahi	Level Kapabilitas APIP	Level 3	503.903.572	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Cimahi	Level Kapabilitas APIP	Level 3	2.295.491.000	
6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi yang dihasilkan	2 dokumen	155.000.000	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi yang dihasilkan	2 dokumen	369.216.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (12)
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.03.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Cimahi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	155.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kota Cimahi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 rekomendasi	369.216.000	
6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	18 kegiatan	348.903.572	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	18 kegiatan	1.926.275.000	
6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	30 Perangkat Daerah	114.975.572	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	30 Perangkat Daerah	372.144.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	36 kegiatan	171.800.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	36 kegiatan	706.343.000	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	30 Perangkat Daerah	62.128.000	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	30 Perangkat Daerah	847.788.000	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Kota Cimahi	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	9.742.910.428	INSPEKTORAT DAERAH	Kota Cimahi	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	12.932.310.110	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Cimahi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	37.422.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Cimahi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	228.095.000	
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	13 dokumen	37.422.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	13 dokumen	228.095.000	
6.01.01.2.01.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dokumen	26.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dokumen	142.315.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	18 laporan	11.022.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	18 laporan	85.780.000	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Cimahi	Nilai IKM Perangkat Daerah	96	9.466.582.390	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Cimahi	Nilai IKM Perangkat Daerah	80,27	12.332.256.110	
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	20 laporan	8.605.874.390	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	20 laporan	10.946.345.238	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting (12)
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang	8.592.014.390	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	35 orang	10.933.189.238	
6.01.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	7.260.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	6.936.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	18 laporan	6.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	18 laporan	6.220.000	
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 bulan	258.500.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 bulan	285.884.680	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	41.178.750	
6.01.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	78.454.000	
6.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	46.980.930	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	93.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	100.093.000	
6.01.01.2.06.00.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	25.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Cimahi	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	19.178.000	
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Cimahi	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	2 set/unit	73.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	2 set/unit	667.354.000	
6.01.01.2.07.00.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Cimahi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Cimahi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	616.154.000	Kelengkapan Kota Cimahi Pengadaan Kendaraan Dinas

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Bagi Ekelon II di seluruh Peringkat Daerah Kota Cimahi
6.01.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel	Kota Cimahi	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Cimahi	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 paket	-	Efisien
6.01.01.2.07.00.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	63.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	51.200.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 bulan	259.368.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 bulan	43.200.000	
6.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	49.368.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	42.640.000	
6.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	210.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	560.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	12 bulan	269.840.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	12 bulan	389.472.192	
6.01.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	3 unit	120.540.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	3 unit	145.312.064	
6.01.01.2.09.00.05	Pemeliharaan Mebel	Kota Cimahi	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	6.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Cimahi	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	5.940.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	93.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	175.924.128	
6.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	62.296.000	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Cimahi	Indeks Profesionalitas ASN	51,00	238.906.038	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Cimahi	Indeks Profesionalitas ASN	75,59	371.959.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah ASN yang meningkatkan kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawalan	35 orang	238.906.038	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah ASN yang meningkatkan kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawalan	35 orang	371.959.000	
6.01.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah paket pakaihan dinas beserta atribut kelengkapan	45 paket	35.000.000	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah paket pakaihan dinas beserta atribut kelengkapan	45 paket	45.000.000	
6.01.01.2.05.00.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Cimahi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 orang	70.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Cimahi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 orang	105.662.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.01.01.2.05.00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35 orang	133.906.038	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	35 orang	221.297.000	
Jumlah					10.989.564.000					17.341.006.238	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil dari Kegiatan Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Cimahi, yang dilaksanakan pada hari Jumat, Tanggal 23 Februari 2024, bertempat di West Point Hotel Kota Bandung, yang dihadiri oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi adalah tidak adanya usulan program/kegiatan Tahun 2025 bagi Inspektorat Kota Cimahi dari Perangkat Daerah yang hadir.

Tabel 2.5.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Cimahi

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendampingan rutin terkait penyusunan Manajemen Risiko	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	30 Perangkat Daerah	Masukan dari dr. Reri Marliah, Sekretaris Dinas Kesehatan
2	Dukungan dan pendampingan kegiatan program sumber anggaran APBN dan Banku dan dana transfer lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	6 Perangkat Daerah	
3	Memberikan informasi dokumen yang harus disiapkan terkait koordinasi dengan Inspektorat dan tahapan yang harus dilaksanakan oleh SKPD sebelum mengadakan /pelaksanaan pengadaan	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	30 Perangkat Daerah	
4	Coaching dan evaluasi untuk mencegah kesalahan /ketidaktepatan pelaksanaan kegiatan program maupun administrasinya dapat ditingkatkan.	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	30 Perangkat Daerah	
5	Meningkatkan pembinaan atau penyuluhan bagi para pegawai di lingkungan pemerintah Kota Cimahi tentang pengetahuan	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta	30 Perangkat Daerah	Masukan dari Yane Susan, Kasubag Program, Anggaran dan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	/ pencegahan penyalahgunaan kewenangan pegawai sehingga kasus-kasus yang ada di seputar ASN Pemerintah Kota Cimahi dapat ditekan.		verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		Keuangan, Bakesbangpol
6	Inspektorat lebih mengedepankan fungsi pencegahan	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan	
7	Hasil Reviu DPA bisa disampaikan ke PPTK dengan diadakan rapat	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	30 Laporan	Masukan dari Ucu pipip A, Sekretaris Bappenda
8	Hasil pemeriksaan bisa dijadikan alasan untuk kegiatan tahun berikutnya.	Kota Cimahi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	
9	Dibangunnya aplikasi (SI) Manajemen Risiko	Kota Cimahi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	Masukan dari Dwi Retnani, Perencana Ahli Muda, Disarda
10	Efektivitas penyusunan/Pembangunan manajemen risiko dan Rencana Tindak Pengendalian sehingga benar-benar menjadi alat untuk membangun kinerja dan tujuan organisasi.	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	30 Perangkat Daerah	
11	Bagaimana Inspektorat dapat menjadi jembatan bagi Masyarakat pelaku ekonomi atau komponen Masyarakat Cimahi lainnya untuk mengadakan forum seperti ini dengan Leading Sektor Masyarakat yang difasilitasi oleh Inspektorat dengan materi Tusi Inspektorat dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	2 kegiatan	Masukan dari Niagara Rahardja, Sekretaris DPKP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Pelaksanaan rekonsiliasi antara Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, dan PPK SKPD dilaksanakan setiap bulan	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	30 Perangkat Daerah	Masukan dari Lia Yulianti, Sekretaris BPKAD
13	Untuk pemeriksaan stock opname kas dan persediaan agar menjadi agenda rutin tidak tematik	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	30 Laporan	
14	Inspektorat melakukan pembinaan kepada bendahara dan pengurus barang secara rutin dan bertema	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	30 Perangkat Daerah	
15	Pembuatan aplikasi monitoring SPU sehingga arsip SPU perangkat daerah terarsip dengan baik secara online swetiap bulan sehingga bisa dipantau setiap bulan dan mempermudah dalam audit oleh Tim pemeriksa/auditor	Kota Cimahi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	Masukan dari Sonya Rahmah, Analis, Perencana, Evaluasi dan Pelaporan DP3AP2KB
16	Pembinaan terhadap perangkat daerah atas pelaksanaan urusan pemerintahan agar dilakukan lebih intensif sehingga kualitas penyelenggaraan urusan meningkat	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan	Masukan dari Jamila B, Kasubbag Umpeg Diskominfo
17	Memiliki aplikasi yang terintegrasi mulai perencanaan sampai pelaporan sehingga dalam pembinaan perangkat daerah bisa memonitor via aplikasi tersebut baik secara dokumen maupun bukti spj	Kota Cimahi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	
18	Agar lebih meningkatkan lagi Kerjasama atau berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya agar tetap terjaga harmonisasi terutama dalam menyikapi atau aduan Masyarakat	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 Laporan	Taufik Rahman, Analis Penegakan Integritas dan Disiplin SDMA BKPSDMD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Inspektorat agar lebih solid, kompak dan bersinergi	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan	
20	Dalam pemeriksaan tidak sedikit ditemukan adanya perbedaan penafsiran terhadap objek pemeriksaan yang selanjutnya berdampak pada pengembalian (kelebihan pembayaran) Hal ini terjadi terkadang karena posisi pemeriksa lebih bagus dibanding mereka yang diperiksa padahal secara anggaran, pihak yang diperiksa tidak juga dapat disalahkan. Terkait dengan hal ini, siapakah pihak yang dapat membela pihak yang diperiksa ? dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang diperiksa untuk mendapatkan pembelaan?	Kota Cimahi	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	4 Laporan	Iyan, Sekretaris DPUPR

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan arah kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, berupa Prioritas Nasional berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan Nasional ini, sinergi Program Prioritas Provinsi Jawa Barat RPJMD 2018-2023 serta sinergi dengan Prioritas Kota Cimahi RPD 2023-2026, serta sinergi dengan Tujuan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yaitu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan, yang dijabarkan menjadi dua sasaran strategis Inspektorat Kota Cimahi, yaitu: Meningkatnya kualitas pengawasan; dan Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik. Berikut adalah Tabel Keterkaitan Tujuan Inspektorat terhadap Kebijakan Nasional.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Tujuan Inspektorat Kota Cimahi Renstra 2023-2026 dengan Kebijakan Prioritas Nasional, Kebijakan Prioritas Provinsi Jawa Barat, dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Kota Cimahi yang Berhubungan dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat

KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2020-2024	KEBIJAKAN PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT RPJMD 2018-2023	KEBIJAKAN PRIORITAS KOTA CIMAH RPD 2023-2026	TUJUAN INSPEKTORAT RENSTRA 2023-2026	SASARAN INSPEKTORAT RENSTRA 2023-2026
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pengawasan Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Inspektorat Kota Cimahi mendukung terhadap Pencapaian Misi ke-2 Kota Cimahi Tahun 2023-2026, yaitu: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". Tujuan RPJMD Kota Cimahi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Meningkatkan tata kelola

pemerintahan. Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi untuk mewujudkan tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 adalah Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Nilai Maturitas SPIP, dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Tabel 3.2 menunjukkan Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan 2025	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran 2025
Meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	60,78	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	5%
				Nilai Maturitas SPIP	Level 3
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan.

Rencana Anggaran Inspektorat Tahun 2025 sebesar Rp.17.341.006.238,00 (Tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Berikut adalah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025.

3.3.1 Rencana Program

Program-program pengawasan dan pembinaan menyesuaikan dengan Program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Inspektorat, yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel dengan sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di Kota Cimahi, mendorong terciptanya kualitas aparatur pemerintah yang profesional dan bersih, dan meningkatkan koordinasi-sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Aparatur Inspektorat Kota Cimahi dengan sasaran sistem perencanaan dan pelaporan keuangan maupun kinerja Inspektorat yang akuntabel.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Aparatur Inspektorat Kota Cimahi dengan sasaran terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran.

3.3.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program pengawasan dan pembinaan, yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Inspektorat Kota Cimahi yang berdimensi lima tahunan. Rencana kegiatan di Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sudah sesuai dengan rancangan Renja 2025, namun ada beberapa perubahan pagu indikatif karena disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan.

Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 terdapat dalam **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Cimahi
Nama Perangkat Daerah: Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Cimahi	60,78	17.341.006.238	APBD Kota Cimahi		60.80	10.869.660.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang- Undangan	Kota Cimahi	5%	2.113.205.128	APBD Kota Cimahi		5%	987.448.572
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase Hasil Pengawasan	Kota Cimahi	97,29 %	2.113.205.128	APBD Kota Cimahi		90%	642.750.000

Kode	Urusan/Eidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kota Cimahi	25 kegiatan	1.657.223.064	APBD Kota Cimahi		25 kegiatan	522.740.000
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	30 laporan	653.392.064	APBD Kota Cimahi		30 laporan	189.970.000
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	5 laporan	263.940.000	APBD Kota Cimahi		5 laporan	62.285.000
6.01.02.2.01.0003	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil revisi laporan kinerja	Kota Cimahi	30 laporan	274.160.000	APBD Kota Cimahi		30 laporan	45.485.000
6.01.02.2.01.0004	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil revisi laporan keuangan	Kota Cimahi	30 laporan	178.745.000	APBD Kota Cimahi		30 laporan	45.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.2.0 1.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APSP	Kota Cimahi	12 dokumen	286.986.000	APBD Kota Cimahi		12 dokumen	180.000.000
6.01.02.2.0 2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kota Cimahi	8 kegiatan	455.982.064	APBD Kota Cimahi		8 Kegiatan	120.010.000
6.01.02.2.0 2.0001.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kota Cimahi	4 laporan	166.272.064	APBD Kota Cimahi		4 Laporan	50.765.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.02.2.0 2.0002.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Cimahi	5 laporan	289.710.000	APBD Kota Cimahi		5 Laporan	69.245.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Kota Cimahi	Level 3	2.295.491.000	APBD Kota Cimahi		Level 3	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Kota Cimahi	Level 3	2.295.491.000	APBD Kota Cimahi		Level 3	344.698.572
6.01.03.2.0 1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi yang dibagikan	Kota Cimahi	2 dokumen	369.216.000	APBD Kota Cimahi		2 dokumen	67.570.572

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Pikirkan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.2.0 1.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Kota Cimahi	2 rekomendasi	369.216.000	APBD Kota Cimahi		2 Rekomendasi	67.570.572
6.01.03.2.0 2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kota Cimahi	18 kegiatan	1.926.275.000	APBD Kota Cimahi		18 Kegiatan	277.128.000
6.01.03.2.0 2.0002	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Cimahi	30 Perangkat Daerah	372.144.000	APBD Kota Cimahi		30 Perangkat Daerah	25.000.000

Kode	Urusan/Didang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prokiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.03.2.0 2.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencapaian dan pemberantasan korupsi	Kota Cimahi	36 kegiatan	706.343.000	APBD Kota Cimahi		36 Kegiatan	190.000.000
6.01.03.2.0 2.0004	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Pencapaian Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	Kota Cimahi	30 Perangkat Daerah	847.788.000	APBD Kota Cimahi		30 Perangkat Daerah	62.128.000
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Kota Cimahi	65	12.932.310.110	 APBD Kota Cimahi		66	9.909.211.428

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Cimahi	A	228.095.000	APBD Kota Cimahi		A	9.909.211.428
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	Kota Cimahi	13 dokumen	228.095.000	APBD Kota Cimahi		13 Dokumen	37.422.000
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kota Cimahi	7 dokumen	142.315.000	APBD Kota Cimahi		7 dokumen	26.400.000
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	18 laporan	85.780.000	APBD Kota Cimahi		18 Laporan	11.022.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	Kota Cimahi	80,27	12.332.256.110	APBD Kota Cimahi		96,5	9.639.082.678
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	Kota Cimahi	20 laporan	10.946.345.238	APBD Kota Cimahi		20 Laporan	8.778.374.678
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Cimahi	35 orang	10.933.189.238	APBD Kota Cimahi		35 orang	8.763.854.678

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Bencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.0 2.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Cimahi	2 laporan	6.936.000	APBD Kota Cimahi		2 laporan	7.260.000
6.01.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kota Cimahi	18 laporan	6.220.000	APBD Kota Cimahi		18 laporan	7.260.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	Kota Cimahi	12 bulan	283.884.680	 APBD Kota Cimahi 1		12 Bulan	268.500.000
6.01.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Cimahi	1 paket	41.178.750	APBD Kota Cimahi		1 Paket	60.000.000
6.01.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Cimahi	12 paket	78.454.000	APBD Kota Cimahi		12 paket	70.000.000
6.01.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggunaan yang disediakan	Kota Cimahi	12 paket	46.980.930	APBD Kota Cimahi		12 paket	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelinggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Cimahi	12 laporan	100.093.000	APBD Kota Cimahi		12 laporan	93.500.000
6.01.01.2.0 6.00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kota Cimahi	12 dokumen	19.178.000	APBD Kota Cimahi		12 Dokumen	25.000.000
6.01.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah set/unit Barang Milik Daerah yang diadakan	Kota Cimahi	2 set/unit	667.354.000	APBD Kota Cimahi		2 set/unit	73.000.000
6.01.01.2.0 7.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Cimahi	1 unit	616.154.000		Kebijakan Kota Cimahi Pengadaan Kendaraan Dinas Bagi		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Eselon II di seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi		
6.01.01.2.0 7.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Cimahi	1 paket	-	APBD Kota Cimahi	Efisiensi	1 paket	10.000.000
6.01.01.2.0 7.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	1 unit	51.200.000	APBD Kota Cimahi		1 unit	63.000.000
6.01.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	Kota Cimahi	12 bulan	43.200.000	APBD Kota Cimahi		12 Bulan	259.368.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Cimahi	12 laporan	42.640.000	APBD Kota Cimahi		12 laporan	49.358.000
6.01.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Cimahi	12 laporan	560.000	APBD Kota Cimahi		12 Laporan	210.000.000
6.01.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	Kota Cimahi	12 bulan	389.472.192	APBD Kota Cimahi		12 Bulan	259.840.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak pertinannya	Kota Cimahi	3 unit	145.312.064	APBD Kota Cimahi		3 unit	120.540.000
6.01.01.2.0 9.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kota Cimahi	2 unit	5.940.000	APBD Kota Cimahi		2 unit	6.000.000
6.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Cimahi	11 unit	175.924.128	APBD Kota Cimahi		11 unit	93.300.000
6.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Cimahi	1 unit	62.296.000	APBD Kota Cimahi		1 unit	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Profesionalitas ASN	Kota Cimahi	75,59	371.959.000	APBD Kota Cimahi		51,50	232.706.750
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawalan	Kota Cimahi	35 orang	371.959.000	APBD Kota Cimahi		35 orang	232.706.750
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Paketan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakalan dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Cimahi	45 paket	45.000.000	APBD Kota Cimahi		45 paket	35.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.01.01.2.0 5.00009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Cimahi	35 orang	105.662.000	APBD Kota Cimahi		35 orang	127.706.750
6.01.01.2.0 5.00011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Kota Cimahi	35 orang	221.297.000	APBD Kota Cimahi		35 orang	70.000.000
Jumlah					17.341.006.238				10.896.660.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran untuk menetapkan apa (*what*) perihal yang akan dicapai dan kapan (*when*) perihal tersebut akan dicapai, maka perlu ditentukan tentang bagaimana (*how*) untuk mencapai perihal tersebut atau yang disebut *strategi*.

Strategi Inspektorat Kota Cimahi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini terdiri dari kebijakan rencana kerja pembinaan dan pengawasan, program dan kegiatan. Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap pegawai Inspektorat Kota Cimahi untuk melaksanakan tugasnya. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022. Kebijakan-kebijakan pembinaan dan pengawasan dimaksud dengan fokus sebagai berikut:

1. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:

a. Kinerja Rutin Pengawasan

1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

- 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
- 5) reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah

mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;

3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

5) bantuan operasional sekolah (BOS): Inspektorat Daerah Kota Cimahi, dengan sasaran meyakinkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Pengawasan Reformasi Birokrasi (RB):

a. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam berfokus pada dua hal yang dikenal dengan *'double track'* ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020-2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik.

Reformasi Birokrasi General:

- 1) RB General mempunyai sasaran jangka Panjang untuk mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah.

- 2) RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
- 3) Selanjutnya RB General juga mempunyai fokus pada tercapainya budaya birokrasi berAKHLAK dengan ASN professional.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN.

3. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dan
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor;
- dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

4.1.1. Rencana Program

Program-program pengawasan dan pembinaan menyesuaikan dengan Program-program untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Inspektorat, yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat, program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efisien, efektif dan akuntabel dengan sasaran meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Kota Cimahi, mendorong terciptanya kualitas aparatur pemerintah yang professional dan bersih, dan meningkatkan koordinasi-sinergitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan.

2. Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi

Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Kota Cimahi dengan sasaran sistem perencanaan dan pelaporan keuangan maupun kinerja Inspektorat yang akuntabel.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi Inspektorat Kota Cimahi dengan sasaran terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran.

4.1.2. Rencana Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program pengawasandan pembinaan, yang memiliki dimensi waktu tidak lebih dari 1(satu) tahun. Kegiatan yang bersifat tahunan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi program kerja operasional Inspektorat yang berdimensi lima tahunan. Kegiatan-kegiatan di Inspektorat Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
4. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.2. Rencana Pagu Indikatif

Rencana penganggaran Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2025 dalam tabel 4.1. telah disusun memperhitungkan perkiraan maju.

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran
Indikatif Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Dana/Pagu Indikatif Renja 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.113.205.128
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.657.223.064
	Sub Kegiatan:	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	653.392.064
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	263.940.000
	Reviu Laporan Kinerja	274.160.000
	Reviu Laporan Keuangan	178.745.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	286.986.000
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	455.982.064
	Sub Kegiatan:	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	166.272.064
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	289.710.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Dana/Pagu Indikatif Renja 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.295.491.000
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	369.216.000
	Sub Kegiatan:	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	369.216.000
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1.926.275.000
	Sub Kegiatan:	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	372.144.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	706.343.000
	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	847.788.000
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.932.310.110
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	228.095.000
	Sub Kegiatan:	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.315.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.780.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.946.345.238
	Sub Kegiatan:	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.933.189.238
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.936.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.220.000
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.884.680
	Sub Kegiatan:	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.178.750
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.454.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.980.930

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Dana/Pagu Indikatif Renja 2025 (Rp)
(1)	(2)	(3)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100.093.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.178.000
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	667.354.000
	Sub Kegiatan:	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	616.154.000
	Pengadaan Mebel	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.200.000
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.200.000
	Sub Kegiatan:	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.640.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	560.000
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.472.192
	Sub Kegiatan:	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.312.064
	Pemeliharaan Mebel	5.940.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.924.128
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.296.000
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	371.959.000
	Sub Kegiatan:	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.662.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	221.297.000
	Jumlah	17.341.006.238

BAB V

PENUTUP

Tujuan Negara Indonesia dijelaskan dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Paragraf tersebut menyatakan bahwa tujuan negara adalah membentuk pemerintah yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Inspektorat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Negara Indonesia sesuai dengan tugas pokoknya, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang meliputi pengawasan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta urusan kesekretariatan.

Inspektorat Kota Cimahi dalam menjalankan fungsinya memiliki tanggungjawab pengawasan yang dibebankan kepada Inspektorat dalam rangka pencapaian Visi Kota Cimahi Tahun 2023-2026, yaitu: **“Cimahi Kota Cerdas”**. Terutama Misi ke-dua **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik”**.

Pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang pemerintahan masih diwarnai dengan perubahan konsep pemikiran, kebijakan (*policy*), dan patok unggul (*benchmark*) yang dipergunakan, maupun pembenahan peraturan/produk hukum dalam rangka mencari bentuk terbaik penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut telah mempengaruhi efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Cimahi, khususnya yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi. Implikasi dari hal ini adalah masih kurang optimalnya kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam membangun Kota Cimahi. Melalui rencana kerja diharapkan sinergi dalam pembangunan daerah dapat tercapai.

Rencana kerja juga merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran (Dana) dan sumber daya lain yang memadai sehingga

kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan akan berjalan lebih efektif, efisien dan ekonomis. Selanjutnya rencana kerja dapat diimplementasikan dengan baik apabila komitmen yang tertuang dalam Rencana Kerja dapat diselenggarakan secara konsisten oleh seluruh jajaran Inspektorat Kota Cimahi.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 ini dibuat untuk dijadikan acuan penyelenggaraan tugas Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang profesional dan konstruktif dalam mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KOTA CIMAH

Pada hari Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-02-2024) telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Cimahi yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi;
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Cimahi terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 23 Februari 2024

Jam : 11.00 WIB

Tempat : West Point Hotel Jalan L.M. Nurtanio No.63 Kota Bandung

Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024.

MENYEPAKATI :

- KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Cimahi;
- KEDUA** : Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KEEMPAT** : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil

kesepakatan Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Cimahi ini;
dan

KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kota Cimahi Tahun 2025

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

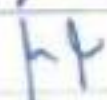
Cimahi 23 Februari 2024

**Pimpinan Sidang,
INSPEKTUR**


Dra. IPUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650921 199102 1 001

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kota Cimahi

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Dede Anasah	BPICD		
2.	dr. Perli Marliah	Dinkes		
3.	Iyus S.M	DPUPR		
4.	Lia Yuliati	BPKAD		
5.	Bruce Anwar			

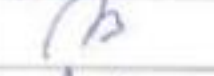
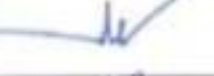
LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 00.01-01.01/311/Sekre
TANGGAL : 23 Februari 2024

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

Tanggal : 23 Februari 2024

Tempat : West Point Hotel Jalan L.M.Nurtanio No. 63 Kota Bandung

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
1.	R. TIANI A.	Inspektorat		
2.	Maria - F.	Serdan		
3.	Ipong Mustopa	Inspektorat		
4.	Devi O	Kep KP		
5.	Yunita A.W	Inspektorat		
6.	Ipan S	Inspektorat		
7.	Yani P	Inspektorat		
8.	Aditia p	Inspektorat		
9.	DIYATI U	DISPANS TAN		
10.	Berung T-R	Inspektorat		
11.	Bude amur.	Inspektorat		
12.	Rosa. W.	Inspektorat		
13.	Tarikh R	akademo		
14.	Maryo S	DLH		
15.	Inge W.	Inspektorat		

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
16	YANI SUSAN	BALIKESBANG POL	08122040852	
17	JAMILA B	Discominfo	081320007478	
18	Nur Raita Nuriati	Inspektorat	081356763162	
19	Anni	Inspektorat	—	
20	Dwi Rahani I	Disarda	082130821239	
21	RITA	PETA / PAM	08122344241	
22	RUDI	PRVD	08132149212	
23	Wahyuni	Inspektorat	0812346780	
24	dr. Reri	Dinkes	087830003286	
25	Agus	Satpol	08132164121	
26	NIASAR	BPKP	08217790989	
27	NENDRA	Inspektorat	—	
28	Wahuni	Disarda	08132331046	
29	Iyuni SM	DPUPP	082126834343	
30	Sangra K	DP3AP2KB	0388 202 1058	
31	Rika Purnama	Inspektorat	08220513045	
32	Kuswandi	Seturan	081769624971	
33	Lia Yulati	BPKAD	08112313277	

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
34	Ukov A/pip	BAPPENBAR		
35	Kenal	Bukayal		
36	T. Mestwari	memus		
37	Abd. H	ket		
38	Diane	Inspektorat		
39	Aerda	hupakot		
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT KOTA CIMAHI
NOMOR : 00.01.01-01/311/Sev/0
TANGGAL : 23 Februari 2024

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KOTA CIMAHI
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Tanggal : 23 Februari 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Pengawasan Urusan Pemerintah					
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan	88%	90%	742,750,000	642,750,000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	25 Kegiatan	25 Kegiatan	592,740,000	522,740,000
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	30 laporan	30 laporan	209,970,000	189,970,000
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	5 laporan	5 laporan	82,285,000	62,285,000
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	30 laporan	30 laporan	75,000,000	45,000,000
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	30 laporan	30 laporan	45,485,000	45,485,000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	12 Dokumen	180,000,000	180,000,000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	8 Kegiatan	8 Kegiatan	150,010,000	120,010,000
	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian Kerugian Negara/daerah yang ditangani	4 laporan	4 laporan	60,765,000	50,765,000
	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	5 laporan	5 laporan	89,245,000	69,245,000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	503.903.572	344.698.572
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi yang dihasilkan	2 dokumen	2 dokumen	155,000,000	67,570,572

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	2 Rekom endasi	2 Rekom endasi	155.000.000	67.570.572
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	18 kegiatan	18 kegiatan	348.903.572	277.128.000
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	114.975.572	25.000.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	36 kegiatan	36 kegiatan	171.800.000	190.000.000
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan penegakan integritas	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	62.128.000	62.128.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	9.742.910.428	9.909.211.428

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	13 dokumen	13 dokumen	37,422,000	37,422,000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	26,400,000	26,400,000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	11,022,000	11,022,000
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah	96	96,5	9,466.582.390	9,639.082.678
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	20 Laporan	20 Laporan	8.605.874.390	8,778.374.678
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	35 orang	8,592.014.390	8,763.854.678
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	7,260,000	7,260,000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18 Laporan	18 Laporan	6,600,000	7.260.000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	258,500,000	268,500,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	60,000,000	60,000,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	60,000,000	70,000,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	20,000,000	20,000,000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	93,500,000	93,500,000
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	25,000,000
	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	2 set/unit	2 set/unit	73,000,000	73,000,000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,000,000
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan	1 unit	1 unit	63,000,000	63,000,000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
		lainnya yang disediakan				
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Bulan	12 Bulan	259,368,000	259,368,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	49,368,000	49,368,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	210,000,000	210,000,000
	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	12 Bulan	12 Bulan	269,840,000	259,840,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	120,540,000	120,540,000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	2 unit	6,000,000	6,000,000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	11 unit	93,300,000	93,300,000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	50,000,000	40,000,000

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja		Pagu Anggaran	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	51	51,50	238.906.038	232.706.750
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	35 orang	35 orang	238.906.038	232.706.750
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	45 Paket	35.000.000	35.000.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	35 orang	35 orang	70.000.000	70.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang	133.906.038	127.706.750
TOTAL PAGU					10.989.564.000	10.896.660.000

LAMPIRAN III : DAFTAR KEGIATAN LINTAS PERANGKAT
DAERAH DAN LINTAS WILAYAH

**Daftar Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah
INSPEKTORAT KOTA CIMAHI TAHUN 2025**

NO	SUB KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	ALASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Cimahi	30 OPD	Dalam rangka pendampingan dan penyusunan Renaksi Reformasi Birokrasi diperlukan adanya Bimbingan Teknis dan Monev PMPRB kepada 30 OPD Kota Cimahi
2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Cimahi	18 Kegiatan	Dalam upaya pencegahan korupsi diperlukan sebuah wadah kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Tim Saber Pungli), sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Cimahi	6 OPD	Dalam rangka Bimbingan Teknis dan Pendampingan wilayah Zona Integritas terhadap 6 OPD (DPMPPTS, Disdukcapil, RSUD Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kec. Cimahi Selatan, Kec. Cimahi Tengah)
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	30 OPD	Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah diperlukan adanya koordinasi bersama Forum Perangkat Daerah

5	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	30 OPD	- Dalam rangka pengawasan internal dilaksanakan kegiatan berupa audit kinerja, audit ketaatan, monev inflasi, monev SPM, reviu P3DN dan pendampingan terhadap 30 perangkat daerah Kota Cimahi - Dalam rangka pengawasan kinerja diperlukan adanya audit gabungan bersama BPKP/BPK maupun instansi lainnya
6	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	3 Kegiatan	Dalam rangka pengawasan internal dilaksanakan reviu DAK dan dana hibah terhadap OPD penerima dana DAK dan Hibah - Dalam rangka pengawasan keuangan diperlukan adanya audit gabungan bersama BPKP/BPK/Kemendagri/instansi lainnya
7	Reviu Laporan Kinerja	Kota Cimahi	30 OPD	Dalam rangka pengawasan internal dilaksanakan reviu kinerja terhadap 30 Perangkat Daerah Kota Cimahi
8	Reviu Laporan Keuangan	Kota Cimahi	30 OPD	Dalam rangka pengawasan internal dilaksanakan reviu dan audit keuangan terhadap 30 Perangkat Daerah Kota Cimahi

9	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Cimahi	4 Kegiatan	Dalam rangka pengawasan dilaksanakan gelar pengawasan bersama BPKP/BPK RI
		Kota Cimahi	3 Kegiatan	Dalam rangka replikasi Aplikasi SIMASNGAWAS diperlukan adanya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SIMASNGAWAS. Lintas sektor yang terkait kegiatan adalah Diskominfo Kota Cimahi dan Diskominfo Kota Bandung
10	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Cimahi	1 Kegiatan	Sebagai upaya penanganan pengaduan masyarakat dan permintaan penghitungan kerugian daerah oleh Aparat Penegak Hukum
11	Penanganan Penyelesaian Keuangan Negara/Daerah yang ditangani	Kota Cimahi	8 Kegiatan	Untuk mempercepat penyelesaian kerugian daerah diperlukan adanya koordinasi bersama BPKP/BPK/Instansi lainnya yang terkait
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tentatif	35 Orang	Peningkatan kapasitas APIP maupun ASN diperlukan kerjasama dengan berbagai badan DIKLAT yang dimiliki seperti Kemendagri, BPKP maupun Bappenas